#### **BABII**

# DINAMIKA PEMBERITAAN CNN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN KEAMANAN MELALUI KONTROL PERBATASAN PRANCIS SETELAH PARIS ATTACK 2015

Kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi berita harian memaksa kanalkanal media untuk terus berkembang. Dalam hal ini, penyajian berita faktual yang
melingkupi fenomena sosial, ekonomi, maupun politik dalam kurun waktu *real-*time, tentu akan menjadi sorotan bagi publik, sekaligus menciptakan ruang-ruang
publik untuk berdiskusi hingga membuahkan opini di kalangan masyarakat itu
sendiri. Ketergantungan masyarakat terhadap produk jurnalisme media ini
kemudian mengindikasi adanya celah bagi media-media yang bersangkutan, untuk
dapat mengarahkan persepsi/pemahaman publik sesuai yang mereka kehendaki.
Adapun dalam kondisi krisis, kebutuhan akan media akan berlipat dua kali lebih
tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Doris Graber, seorang ilmuwan politik
AS, bahwa pada masa krisis, maka publik akan bergantung sepenuhnya pada
pemberitaan media massa sebagai upaya untuk mengetahui langsung peristiwa
dalam negeri (Ferarto, 2017).

Berkaitan dengan terjadinya tragedi Paris Attack 2015, maka pada bab ini penulis mengulas secara komprehensif ketersinambungan antara media Cable News Network (CNN), fenomena Paris Attack 2015, hingga kebijakan keamanan melalui kontrol perbatasan yang diinkorporasi oleh pemerintah Prancis sebagai upaya menjaga sekuritas negara. Pada bagian pertama dari bab ini, penulis terlebih dulu

memaparkan latar belakang kronologi peristiwa Paris Attack 2015, beserta dinamika sosial masyarakat Prancis yang mengikutinya. Lalu pada bagian selanjutnya, penulis fokus pada ulasan terkait kebijakan keamanan melalui kontrol perbatasan yang dieksekusikan pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan Francois Hollande sebagai upaya mempertahankan stabilisasi keamanan dan sekuritas negara. Barulah pada bagian terakhir, penulis membahas mengenai latar belakang dan dinamika media *Cable News Network* (CNN) sebagai kanal media internasional. Pada bagian yang bersangkutan, penulis juga mengulas fenomena *CNN Curve/CNN Effect* yang mengikuti media tersebut.

#### 2.1 Tragedi Paris Attack 2015

#### 2.1.1. Kronologi Terjadinya Paris Attack 2015

Tahun 2015 merupakan tahun yang cukup mengerikan untuk Prancis. Pasalnya, pada bulan Januari, terjadi tragedi serangan di depan kantor majalah Charlie Hebdo dan Supermarket Kosher yang menelan 17 korban jiwa, diantaranya adalah warga sipil dan anggota aparat kepolisian Prancis (CNN, 2022). Setelah melewati masa investigasi dan proses hukum, diketahui bahwa pelaku dari teror Charlie Hebdo ini merupakan anggota dari kelompok islam ekstrimis, ISIS. Peristiwa ini tentu meninggalkan trauma mendalam bagi Prancis, sehingga masyarakat sipil terpaksa melanjutkan hari mereka dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi atas kasus-kasus serangan serupa. Nahas bagi Prancis, karena di bulan November, negara mereka kembali berkabung atas serangan terorisme untuk yang kedua kalinya di tahun itu. Dilansir dari CNN, ledakan bom pertama kali bertempat

di stadion olahraga Stade de France, dimana sedang terjadi pertandingan persahabatan Prancis dan Jerman pada pukul 21.20. Presiden Prancis sendiri, Francois Hollande, sedang berada di dalam stadion untuk menyaksikan pertandingan bola yang sedang berlangsung, untuk kemudian dievakuasi sesegera mungkin. Sebagai respon dari serangan tersebut, Francois Hollande langsung mendeklarasikan status "State of Emergency" dan menutup perbatasan Prancis (CNN, 2022). Tak sampai satu jam kemudian, ledakan kedua dan ketiga meletus di sekitar stadion, yakni beralamat di Avenue Jules Rimet dan Rue de la Cokerie. Akibatnya, sejumlah 4 korban tewas, dimana 3 diantaranya adalah pelaku bom bunuh diri, dan seorang pejalan kaki. Aparat kepolisian yang bertugas untuk menginvestigasi area di sekitar Stade de France kemudian menemukan paspor pengungsi Suriah pada saku salah seorang pelaku, dengan nama palsu Ahmad al-Mohammad. Diketahui paspor tersebut telah digunakan dalam perjalanan ke Eropa dengan mendaftar sebagai pengungsi di pulau Yunani Leros pada 3 Oktober 2015 dan berlanjut untuk pindah ke Serbia untuk mengklaim suaka "Opatovac Refugee" Camp" di Makedonia. Tak lama setelahnya, ia menemukan jalan untuk sampai di Paris (CNN, 2022).

Pada waktu yang bersamaan dengan serangan pertama, 21.25, di restoran La Petit Cambodge dan bar Le Carillon juga terdapat adegan penembakan dari seorang teroris, dimana pelaku tersebut berhasil membunuh 15 orang hingga tewas. Kejadian penembakan lain masih menyusul setelahnya, dengan selang waktu yang juga relatif singkat. Bertempat di depan Café Bonne Biere, jalan Rue de la Fontaine au Roi dan Rue du Faubourg du Temple, sejumlah 5 orang warga sipil tewas

terbunuh pada pukul 21.32. Pergerakan pelaku yang sangat gesit ini membuat teror di Prancis semakin mencekam. Pada pukul 21.36, di malam yang sama, terjadi penembakan yang mengambil tempat di restoran La Belle Equipe, jalan 92 Rue de Charonne. Para pelaku yang terlihat pada kejadian tersebut menembakkan peluru secara acak pada gerombolan warga sipil yang berada di beranda restoran. Sejumlah 19 korban jiwa jatuh dari peristiwa ini, sementara 9 orang lainnya dalam kondisi kritis (CNN, 2022). Lebih lanjut, pada pukul 21.40, terjadi serangan penembakan di gedung konser Bataclan Theater saat sedang berlangsung konser metal dari band Eagles of Death Metal yang berasal dari Amerika Serikat. Di tempat kejadian, seorang saksi mendengar salah seorang penembak menyalahkan Presiden Hollande atas intervensi yang dilakukannya di Suriah (Waluyo, 2018). Tiga pelaku penyerangan berhasil dibekuk oleh aparat kepolisian setempat, dan setelah melalui proses penyelidikan, pelaku diidentifikasi sebagai Omar Ismail Mostefai yang berusia 29 tahun, Foued Mohamed Aggad berusia 23 tahun, serta Samy Amimour yang berusia 28 tahun (BBC, 2016). Korban yang berjatuhan dari peristiwa ini mencapai angka 90 jiwa, dan sepanjang penyerangan berlangsung, ketiga teroris menggunakan senjata AK-47 serta mengenakan rompi bunuh diri.

Pada waktu yang bersamaan, seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di dalam restoran *Comptoir Voltaire*, jalan *253 Boulevard Voltaire*, dan peristiwa ini mengakibatkan 15 orang cedera. Sehingga secara keseluruhan, serangkaian peristiwa pengeboman dan penembakan di malam 13 November ini menewaskan sebanyak 130 orang korban jiwa, termasuk 4 orang penyerang, dan sekitar 300 korban lainnya luka-luka. Dari penyerangan di sejumlah restoran dan

bar pada malam 13 November ini sendiri, pelaku yang berhasil diidentifikasi merupakan Chakib Akrouh berusia 25 yang diketahui merupakan pemuda berkebangsaan Belgia, Brahim Abdeslam berusia 31 tahun, dan Abdelhamid Abaaoud berusia 28 tahun. Diketahui Abdeslam maupun Abaaoud merupakan buron kepolisian Belgia (BBC, 2016). Melalui proses investigasi otoritas Prancis dan sejumlah badan intelijen keamanan negara, dua pelaku lain dari Penyerangan Paris yang juga berhasil ditangkap merupakan Salah Abdeslam yang berkebangsaan Prancis, dan Mohammed Abrini yang berkebangsaan Moroko-Belgia, berhasil lolos ke Belgia untuk merencanakan penyerangan dengan jaringan teroris yang ada di Belgia melalui jalur Brussels (BBC, 2016). Adapun untuk memahami kronologi penyerangan di Paris secara lebih efisien, penulis menyertakannya dalam sebuah tabel dimana bisa dirujuk pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Kronologi Peristiwa Paris Attack 2015

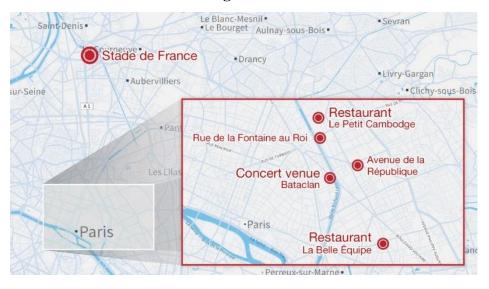
No	Waktu	Tempat	Peristiwa	Jumlah korban
1.	21.20	Stade de France	Bom bunuh	4 orang tewas
			diri	
2.	21.25	La Petit Cambodge	Penembakan	15 orang tewas
		dan Le Carillon		
3.	21.32	Café Bonne Biere	Penembakan	5 orang tewas
4.	21.36	La Belle Equipe	Penembakan	19 orang tewas dan
				9 orang kritis

5.	21.40	Comptoir Voltaire	Bom bunuh	15 orang cedera
			diri	
6.	21.40	Bataclan Theater	Penembakan	90 orang tewas
			dan bom bunuh diri	

Sumber: 2015 Paris Terror Attacks Fast Facts, CNN Editorial Research, 2022

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran terkait titik-titik penyerangan di Paris, penulis juga melampirkan peta yang dilansir dari laman CNN, dimana bisa dirujuk pada Gambar 2.1:

Gambar 2.1
Titik-titik serangan Paris Attack 2015



Sumber: Inside the Bataclan: 'A bloodbath,' witness says, CNN, 2015.

Segera setelah teror di Prancis ini mengambil tempat, pada Sabtu, 14 November 2015, pihak *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) mengklaim pertanggungjawaban atas serangan bom bertubi-tubi di Prancis. Pihak ISIS menyebutkan bahwa serangan yang mereka eksekusikan di ibukota Prancis tersebut adalah bentuk balas dendam atas penghinaan Nabi Muhammad dalam karikatur yang dimuat dalam majalah Charlie Hebdo. Dengan menyebut aksi mereka sebagai "the first of the storm", pihak ISIS juga menyebutkan bahwa serangan mereka merupakan balasan atas keterlibatan Prancis dalam pengeboman di wilayah Irak dan Suriah yang pertama kali diumumkan pada 27 September 2015 (Waluyo, 2018). Pengakuan ini disampaikan oleh organisasi tersebut dalam sebuah unggahan video di internet, serta beberapa pesan tersurat yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Salah satu penggalan kalimatnya berbunyi:

"....In a blessed attack for which Allah facilitated the causes for success, a faithful group of the soldiers of the Caliphate, may Allah dignify it and make it victorious, launched out, targetting the capital of prostitution and obscenity, the carrier of the banner of the Cross in Europe, Paris..." (Reuters, 2015)

Dalam unggahan tersebut, salah satu anggota pasukan ISIS bahkan menyampaikan ancaman bahwa AS mungkin menjadi target serangan kelompok ekstrimis itu selanjutnya (CNN, 2015). Sehingga sebagai respon dari ancaman tersebut, presiden Prancis, Francois Hollande menanggapi dengan komitmennya untuk memberikan ganjaran kepada ISIS, sekaligus mendiskusikan kemungkinan adanya ancaman secara global dengan *UN Security Council*. Dilansir dari CNN, presiden Hollande menyebutkan bahwa "France is at war," dimana hal ini memantik keputusannya untuk menjatuhkan bom di Rakka, Suriah, yang dipercaya merupakan pusat kegiatan "kekhalifahan" dari grup ekstrimis ISIS pada 15

November 2015 (CNN, 2015). Pada hari Senin, pasukan Angkatan Udara Prancis menargetkan pusat komando, pusat perekrutan, pangkalan penyimpanan amunisi, sekaligus kamp pelatihan ISIS di Rakka. Adapun upaya penyerangan Prancis pada pihak ISIS di Suriah ini juga merupakan bagian dari koalisinya dengan Amerika Serikat yang telah dibentuk sejak September 2014 (Putranto, 2019). Serangan Prancis ini betul-betul ditargetkan kepada anggota organisasi ekstrimis ISIS, dan pihak-pihak yang mengelilinginya tanpa mencampurkan sentimen lain. Sebuah grup anti-ISIS di Rakka juga melaporkan, bahwa 24 bom yang dijatuhkan sampai hari Senin tidak menjatuhkan korban dari warga sipil (CNN, 2015).

# 2.1.2. Dinamika Sosial Masyarakat Prancis dengan Imigran Sebelum Paris Attack 2015

Sejatinya, kedatangan imigran ke Prancis sudah dimulai sejak lama lantaran kebutuhan negara-negara Eropa akan tenaga kerja asing dalam peningkatan produksi pasca Perang Dunia II (1950-1974). Hal ini memungkinkan kedatangan tenaga kerja dari wilayah sekitar Eropa seperti Turki, Maroko, Tunisia, maupun Aljazair (Gumilar, 2020). Adanya kebutuhan transaksional ini menjadikan kedatangan tenaga kerja asing sebagai gelombang imigran pertama di Eropa. Hubungan mutualisme antara negara-negara Eropa dengan imigran sebagai tenaga kerja asing pun masih terjalin dengan baik pada masa ini.

Selanjutnya, ketika terjadi krisis minyak dunia, terdapat gerakan restrukturisasi ekonomi yang menghasilkan kebijakan naturalisasi liberal di negaranegara Eropa. Kebijakan ini sendiri juga berlaku di Prancis, dimana penetapan visa

dan izin bermukim oleh negara dimanfaatkan oleh para imigran untuk membawa sanak keluarganya tinggal di Prancis, dan menjadi ajang reunifikasi keluarga (Gumilar, 2020). Karena melebarnya populasi imigran di Prancis, terjadi peningkatan persaingan kerja sekaligus angka pengangguran. Oleh karenanya, masyarakat Prancis melihat imigran menjadi sumber masalah di negara mereka. Mereka beranggapan bahwa kehadiran imigran di negara mereka tidak pantas untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik dibandingkan masyarakat Prancis itu sendiri, dan hal ini ditunjukkan dalam sikap Xenofobik berwujud diskriminasi hingga kekerasan terhadap kaum imigran di Prancis (Mol & Valk, 2016).

Adanya sikap Xenofobik, disertai dengan merekahnya pergesekan kelas (social struggle) yang ada di Prancis kemudian berkembang menjadi internalisasi Islamofobia di Prancis. Konflik sosial pertama yang terjadi antara warga negara Prancis dan umat Muslim yang melakukan demonstrasi lantaran tiga perempuan Muslim berhijab dikeluarkan dari sekolah di daerah Creil, karena menggunakan atribut keagamaan di lingkungan sekolah. Bahkan setelah peristiwa tersebut, pemerintah Prancis mengimplementasikan peraturan yang melarang penggunaan penutup kepala di lingkungan sekolah (Viorst, 1996). Adanya kebijakan pelarangan penggunaan simbol keagamaan oleh Presiden Prancis seperti Jaques Chiraq di tahun 2004 dan Nikolas Sarkozy di tahun 2010, khususnya penguatan undangundang anti burqa dan niqab menjadi bibit masalah baru. Tak hanya sampai disitu, Sarkozy turut menetapkan sejumlah kebijakan terkait imigran dalam "France Immigration and Integration Law", dengan tiga poin utama, yakni penyeleksian imigrasi (immigration choisie), kewajiban integrasi (mandatory integration), dan

pembangunan (co-development) (Gumilar, 2020). Peraturan ini memaksa imigran untuk meninggalkan identitas aslinya bila individu yang bersangkutan hendak menetap di Prancis. Pasalnya, lahirnya peraturan-peraturan tersebut hanya mengeskalasi ketegangan yang telah ada di tengah masyarakat. Kebijakan diskriminatif ini pun tak ayal menjadi salah satu faktor yang membenarkan masyarakat Prancis untuk melakukan tindakan diskriminatif yang kental dengan Islamofobia kepada masyarakat Muslim, utamanya imigran Muslim yang ada disana baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Sebagai hasilnya, Prancis kemudian harus mendera beberapa penyerangan dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pengacau di negara mereka.

Sebelum tragedi Serangan Paris, Prancis telah beberapa kali mendera serangan dan kekacauan di negaranya. Di tanggal 18 Maret 2012, sempat terjadi penembakan di depan sekolah Yahudi di Prancis, yang menelan 4 korban jiwa, 1 diantaranya adalah seorang Rabbi sementara 3 yang lain adalah siswa. Tak hanya itu, sejumlah 6 siswa lain juga mengalami luka-luka. Diketahui pelaku dari serangan tersebut adalah seorang ekstrimis Muslim bernama Mohammed Merah dari kelompok Jihadist Muslim Al-Qaeda (The Washington Post, 2012). Berlanjut pada tahun 2014, dimana terjadi teror yang berlangsung di tempat-tempat umum seperti *Christmas market* di Nantes, jalanan umum di Dijon, atau serangan terbuka di sekitar kantor polisi di daerah Tours dimana pola pelakunya selalu berkelindan dengan agama Islam (Independent, 2014). Lalu pada tahun 2015, serangan lain terjadi di kantor majalah Charlie Hebdo dan Supermarket Kosher di Prancis (CNN, 2015). Adapun rangkuman terkait serangan-serangan yang mengatas namakan

Islam yang terjadi sebelum 13 November 2015 telah dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber dan bisa dirujuk pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2 Serangan di Prancis yang Mengatas Namakan Islam Sebelum Tragedi Paris Attack 2015

No	Peristiwa	Bulan/Tahun Kejadian	
1.	Penembakan di depan sekolah Yahudi di	Maret 2012	
	Prancis		
2.	Penyerangan di tempat-tempat umum di	Desember 2014	
	Prancis selama 3 hari		
3.	Penembakan di depan kantor majalah	Januari 2015	
	Charlie Hebdo		
4.	Perampokan oleh pelaku penembakan di	Januari 2015	
	kantor majalah Charlie Hebdo		
5.	Perampokan di Supermarket Kosher oleh	Januari 2015	
	penembak di kantor majalah Charlie Hebdo		
6.	Penembakan dua polisi wanita oleh pelaku	Januari 2015	
	tragedi di kantor majalah Charlie Hebdo		

Sumber: Dihimpun Penulis dari berbagai sumber, 2023.

Rangkaian teror yang bertubi-tubi ini meninggalkan bekas dan trauma yang sulit untuk disembuhkan. Masyarakat Prancis pun masih kerap kali berkumpul di bekas tempat kejadian perkara untuk mengenang korban-korban yang jatuh,

sekaligus berdoa dan meletakkan bunga (Waluyo, 2018). Dengan aktivitas memorial seperti itu, masyarakat Prancis merasakan solidaritas dan rasa saling memiliki antara satu sama lain.

Tak lama setelah peristiwa Paris Attack yang terjadi pada 13 November 2015, pemerintah Prancis melaksanakan peringatan nasional di tanggal 27 November 2015. Peringatan ini dilaksanakan di Les Invalides, Paris, dan dihadiri oleh petinggi negara, keluarga para korban hingga korban selamat, dan masyarakat Prancis sendiri. Pada kesempatan tersebut, Presiden Francois Hollande menyampaikan komitmennya untuk memerangi kelompok fanatik, seperti yang dikutip dalam pidato beliau, "To all of you, I solemnly promise that France will do everything to destroy the army of fanatics who committed these crimes." (The Guardian, 2015). Pidato dari Presiden Hollande ini memantik semangat solidaritas masyarakat Prancis, sekaligus membangkitkan rasa nasionalisme mereka untuk mendukung rangkaian aksi memorial dan narasi yang dibawa oleh petinggi negara mereka. Hal ini lantas menjadi poin yang membangun identitas kolektif masyarakat Prancis, bahwa mereka sedang berhadapan dengan "musuh" mereka, dimana dalam konteks ini adalah kelompok Islam radikal. Peringatan nasional di Les Invalides ini sendiri dihadiri oleh banyak warga negara Prancis, dan dilaksanakan dalam suasana yang khidmat. Dilansir dari laman The Guardian, gambaran suasana tersebut bisa dirujuk pada Gambar 2.2:





Sumber: Paris Attacks: Survivors and victims' families attend memorial ceremony-as it happened, The Guardian, 2015.

Teror yang datang bertubi-tubi di Prancis selalu terhubung dengan nama Islam tak ayal merubah cara pandang masyarakat Prancis kepada umat Muslim. Persepsi negatif terhadap umat Muslim di Prancis menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Adapun cara pandang negatif yang cenderung skeptikal ini sendiri dinormalisasi oleh masyarakat Prancis, sehingga hal ini membawa dampak terhadap bagaimana imigran-imigran yang bermukim di negara mereka diterima dalam kehidupan sehari-hari, khususnya imigran yang datang dari wilayah Timur Tengah yang notabenenya merupakan pusat perkembangan peradaban Islam.

Di tahun yang sama, membludaknya angka pencari suaka lantaran konflik wilayah turut berdampak pada Eropa dan Prancis. Dilansir dari UNHCR, sebanyak 16,1 jiwa orang mendaftar sebagai pencari suaka secara global, lantaran konflik

wilayah yang terjadi di Timur Tengah. Dari keseluruhan permintaan suaka yang masuk ini sendiri, 55% atau sekitar 8,8 juta jumlahnya dialokasikan ke Eropa dan daerah Afrika Sub-Sahara (UNHCR, 2015). Lebih lanjut, diaspora pengungsi di Eropa ini berada pada angka 4,3 juta jiwa, dimana Prancis mendapatkan total alokasi pengungsi sebesar 273,126 ribu jiwa. Seluruh data statistik ini telah dirangkum oleh UNHCR dan bisa dirujuk melalui Gambar 2.3:

Gambar 2.3 Statistik pengungsi di Prancis pada tahun 2015

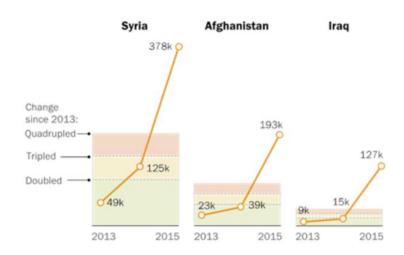
	REFUGEES				
Country/ territory of asylum	Refugees <sup>2</sup>	People in refugee-like situations <sup>3</sup>	Total refugees and people in refugee- like situations	Of whom assisted by UNHCR	Asylum- seekers (pending cases)
Equatorial Guinea	-	-		-	-
Eritrea	2,549	-	2,549	2,549	1
Estonia <sup>18</sup>	168	-	168	-	86
Ethiopia	736,086	-	736,086	736,086	2,131
Fiji	12	-	12	12	8
Finland	12,703	-	12,703	-	24,366
France	273,126	-	273,126	-	63,057
Gabon	943	-	943	943	1,941
Gambia	7,854	-	7,854	7,854	-
Georgia	1,300	679	1,979	1,979	733
Germany	316,115	-	316,115	-	420,625

Sumber: Global Trends Forced Displacement in 2015, UNHCR, 2015.

Sementara itu, dari tingginya angka pengungsi di Eropa sendiri, hasil riset dari Pew Research Center menyatakan bahwa alokasi pengungsi Timur Tengah dengan jumlah populasi paling banyak adalah Suriah, Afghanistan, dan Iraq. Dapat dilihat pada grafik pada Gambar 2.4, ketiga negara ini juga menunjukkan kenaikan jumlah yang signifikan sejak tahun 2013 ke tahun 2015. Di tahun 2013 sendiri, alokasi pengungsi Suriah di Eropa sudah mencapai 49,000 jiwa, yang kemudian berkembang tiga kali lipat menjadi 125,000 jiwa di 2014, dan mencapai angka

paling tinggi sebanyak 378,000 jiwa pada tahun 2015. Sementara itu, Afghanistan juga menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi yakni di angka 23,000 pada tahun 2013, lalu menjadi 39,000 di tahun 2014, dan 193,000 pada tahun 2015. Yang terakhir yakni Iraq, berada pada angka 9,000 jiwa di tahun 2013, lalu bertambah menjadi 15,000 di 2014 dan melonjak empat kali lipat di 2015 dengan total 127,000 jiwa (Pew Research Center, 2016). Adapun grafis statistik berdasarkan data yang dihimpun oleh Pew Research Center dapat dilihat pada Gambar 2.4:

Gambar 2.4 Statistik permohonan masuk imigran Suriah, Afghanistan, dan Iraq tahun 2013-2015 ke Eropa



Sumber: Europe's Growing Muslim Population, Pew Research Center, 2017.

Tingginya angka permohonan pengungsi di wilayah Eropa ini tentunya berdampak pada alokasinya di negara-negara Eropa, termasuk Prancis itu sendiri. Oleh karenanya, muncul kekhawatiran dari warga lokal Prancis bahwa pengungsi-pengungsi yang berisikan mayoritas Muslim ini akan menyebarkan ajaran-ajaran radikal Islam di negara mereka. Selanjutnya, seiring perkembangan krisis

pengungsi dan mobilitas warga negara Prancis, muncul pula ketakutan umat Muslim yang hidup di antara mereka merupakan utusan, atau orang yang terafiliasi dengan organisasi-organisasi terorisme. Tak ayal, mereka kemudian memberikan sikap dingin dan cenderung dismisif kepada umat Muslim, terutama imigran-imigran Muslim yang berdatangan ke Prancis. Hal ini pun dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar untuk dilakukan.

#### 2.2 Upaya Kontrol Perbatasan Prancis Pasca Tragedi Paris Attack 2015

## 2.2.1. Perpanjangan Status Darurat Negara/ "State of Emergency"

Menyikapi serangan dan ancaman yang ada, pemerintah Prancis kemudian perlu mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk dapat memulihkan stabilitas keamanan negara sesegera mungkin. Selagi tindakan represif atas serangan teroris di Prancis dilakukan, Hollande turut memperpanjang status "State of Emergency", dengan tujuan memudahkan penangkapan pelaku. Ekstensi status darurat negara ini sendiri ditempuh dalam perolehan suara di parlemen, dimana Prancis melakukan beberapa proses pengambilan suara terkait hal ini. Pada 14 November 2015, yakni sehari setelah Paris Attack ini mengambil tempat, pemerintah memutuskan "State of Emergency" untuk pertama kalinya. Selanjutnya, lantaran kondisi keamanan di Prancis belum juga stabil, aparat negara memutuskan untuk memperpanjang status darurat tersebut hingga 3 bulan pada 19 November 2015. Upaya optimalisasi stabilitas kemanan ini dinilai cukup sulit dan intens, karena pada 8 Februari 2016, Prancis memperpanjang status tersebut

kembali dengan hitungan 3 bulan, pada 19 Mei 2016 selama 2 bulan, dan pada 20 Juli 2016 selama 6 bulan (France24, 2016).

Kondisi sekaligus ketentuan dalam status darurat negara di Prancis diatur dalam Undang-Undang Nomor 55-385, 3 April 1955, dimana pemerintah Prancis berhak melakukan penutupan temporer terhadap fasilitas umum seperti pub, tempat ibadah, hingga pusat hiburan yang dianggap dapat memprovokasi kekerasan di bawah perintah menteri dalam negeri (Légifrance, 2023). Dalam periode darurat negara ini juga, pemerintah berhak memberikan batasan atas pergerakan individu dan kendaraan untuk bermobilisasi dalam jangka waktu dan tempat yang sudah ditetapkan, seperti yang dimuat dalam pasal 5:

".....1. To prohibit the movement of persons or vehicles in the places and at the hours fixed by decree, 2. To establish, by decree, zones of protection or security where the residence of the persons is regulated, 3. To prohibit the stay in all or part of the department to any person seeking to impede, in any manner whatsoever, the action of the public authorities." (Légifrance, 2023)

Melalui peraturan ini, masyarakat Prancis juga dikenakan jam malam, yang artinya setiap individidu tidak diperkenankan berkeliaran secara bebas dalam batas waktu tertentu (Waluyo, 2018). Dalam penerapan status darurat negara ini pula, pemerintah beserta aparat keamanan yang ditugaskan memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan di lokasi-lokasi tertentu yang dicurigai, untuk membekuk pelaku aksi teror. Untuk menghindari serangan susulan dan melindungi warga negara Prancis, menjelang perayaan Natal, tiap-tiap gereja di Prancis turut mendapatkan pengamanan khusus dari pemerintah. Pihak militer dan aparat keamanan dialokasikan pada 45.000 gereja Katolik, 4.000 gereja Protestan, dan 150

gereja Ortodoks di Prancis. Tak lepas dari itu, untuk menjaga situasi perayaan Natal yang kondusif, sejumlah penjagaan di jalan-jalan besar yang berpotensi menjadi titik kumpul kerumunan warga juga turut dilaksanakan (euronews, 2015).

### 2.2.2. Memperketat Pengamanan Dalam Negeri

Selanjutnya, untuk mendukung operasi penjagaan keamanan di Prancis, presiden Francois Hollande turut mengusulkan penambahan anggota aparat keamanan hingga 5000 anggota tanpa pemotongan anggaran pertahanan negara hingga tahun 2019 (CNN, 2015). Selanjutnya, sepanjang 2015 sendiri, pihak yang bertugas untuk berpatroli dan melacak jejak teroris telah menggeledah sebanyak 2000 rumah sejak Serangan Paris hingga 29 November 2015.

Sementara itu, berkaitan dengan akses keluar-masuk negara, pemerintah Prancis juga tak luput menetapkan regulasi terkait kegiatan di daerah perbatasan. Oleh karena tidak bisa mengisolasi negara secara keseluruhan, pihak pemerintah memutuskan untuk mengontrol volume kegiatan dengan memperketat perbatasan sekaligus membangun kerja sama dengan negara-negara tetangganya seperti Belgia, Belanda, Jerman, Swiss, maupun Spanyol. Belgia sendiri telah memberlakukan kontrol pada titik-titik perbatasannya dengan Prancis segera setelah serangan yang terjadi pada 13 November 2015. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Charles Michel, dimana kontrol perbatasan tersebut ditunjukkan dalam penjagaan dan pembatasan pendatang melalui jalanan, kereta api, serta udara. Sementara itu, negara-negara tetangga Prancis seperti Jerman, Spanyol, dan Italia mengumumkan peningkatan kontrol perbatasan di bandara dan jalur kereta api ke

Prancis pada 15 Juli 2016. Menteri Dalam Negeri Spanyol, Jorge Fernandez Diaz mengutarakan, Spanyol dan Prancis telah sepakat untuk mengimplementasikan kontrol dengan aparat kepolisian secara lebih intens di penyebrangan perbatasan yang diperkenalkan untuk kejuaraan sepak bola Eropa dan *Tour de France* (Waluyo, 2018).

#### 2.2.3. Reformasi Kebijakan Visa Schengen

Lebih lanjut, Prancis yang juga tergabung dalam Perjanjian Schengen dengan Jerman, Belgia, Luksemburg, Belanda, Spanyol, hingga Italia, serta sejumlah negara Eropa lainnya terpaksa harus melakukan beberapa reformasi. Perjanjian Schengen ini sendiri menghasilkan produk berupa Visa Schengen, dimana ide utamanya adalah menghapuskan pemeriksaan berkas yang berbelit di perbatasan antarnegara yang masuk dalam zona Schengen. Hal ini diatur dalam Konvensi Schengen, dimana pada Pasal 2, tertera penghapusan kontol batas internal dan Pasal 3, yang memuat tentang peralihan kontrol ke perbatasan eksternal (Karanja, 2008). Di tahun 1990 sendiri, perjanjian ini telah ditetapkan sebagai bagian dari mekanisme Uni Eropa, dimana dengan adanya Perjanjian Schengen ini selaras dengan nilai-nilai keamanan, keadilan, dan Area Kebebasan Uni Eropa. Tak hanya itu, perjanjian ini juga dinilai menjadi komitmen dari integrasi regional dalam bidang ekonomi dimana warga negara Uni Eropa bisa bebas bekerja dan bepergian tanpa formalitas khusus (Saputro, 2017). Adapun untuk memberikan gambaran terkait zona Schengen di Eropa, penulis melampirkan peta yang dilansir dari laman BBC pada Gambar 2.5:

ICELAND NORWAY IRELAND BELGIUM PORTUGAL SLOVAKIA HUNGARY FRANCE ROMANIA CROATIA SPAIN SLOVENIA BULGARIA Existing Schengen states Existing Schengen states not part of the EU MALTA ■ Non Schengen EU states CYPRUS

Gambar 2.5:
Peta Zona Schengen

Sumber: Schengen: Controversial EU free movement deal explained, BBC, 2016.

Dengan kebebasan aktivitas antar perbatasan ini, terutama setelah peristiwa Paris Attack 2015, maka diperlukan peninjauan kembali. Komisi Eropa mengeluarkan rencana untuk mengubah ketentuan Schengen demi mengembalikan kontrol perbatasan eksternal pada masing-masing negara Uni Eropa, termasuk individu-individu yang memiliki paspor Uni Eropa, dan usulan ini pun didukung oleh pemerintah Prancis. Perubahan mengenai reformasi ini telah diatur dalam *Schengen Border Code* (SBC), lebih khususnya pada Pasal 23 SBC, yang memberikan kemampuan untuk memberlakukan kembali kontrol perbatasan internal negara-negara anggotanya saat terjadi ancaman yang menyerang keamanan nasional. Tentu saja, hal ini dapat dilakukan dengan syarat tetap berpegang pada prinsip proporsionalitas, dan harus menjadi langkah terakhir dalam *"State of* 

Emergency" (Saputro, 2017). Negara yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Prancis, juga harus menginformasikan kepada negara-negara Schengen lainnya, Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan masyarakat.

### 2.3 CNN Sebagai Media Internasional

#### 2.3.1. Sejarah Kanal Media CNN (Cable News Network)

Pada dasarnya, media sebagai alat komunikasi politik telah eksis sejak lama. Selaras dengan fungsinya tersebut, media memuat pemberitaan mengenai aspekaspek sosial dan politik, maupun berita hangat mengenai fenomena yang sedang terjadi. Salah satu pionir kanal media internasional yang paling santer namanya adalah *Cable News Network* (CNN). Untuk memberikan gambaran mengenai media terkait secara komprehensif, penulis akan menjelaskan latar belakang dan dinamika CNN ke dalam beberapa bagian, yakni pendirian kanal media CNN, tahun-tahun pertama hingga perubahan orientasi menjadi media internasional, termasuk ekspansi relasi dengan negara-negara di dunia dan dampak dari jurnalisme yang dilakukan oleh CNN dalam skala global. Selanjutnya, penulis juga akan mengelaborasikan lebih jauh pengaruh yang ditimbulkan dari pemberitaan CNN pasca peristiwa Paris Attack 2015 terutama bagi negara Prancis.

Cable News Network (CNN) sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Ted Turner pada 1 Juni 1980, dan berpusat di Atlanta, Amerika Serikat (AS), sebagai bagian dari Turner Broadcasting System. Pada awal peluncurannya, kanal media ini sempat diragukan oleh publik, lantaran kemunculannya bertepatan dengan peristiwa resesi ekonomi di tahun yang sama. Namun demikian, sang pendiri, Ted

Turner, tetap bersikukuh bahwa kanal media miliknya ini akan bertahan dengan baik. Hal ini kemudian dibuktikan dengan dedikasi CNN, dengan menjadi kanal media pertama yang menyiarkan liputan selama 24 jam penuh (Tias, 2014). Ted Turner mengungkapkan pada tahun awal pendirian CNN,

"... We won't be signing off until the world ends. We'll be on, and we will cover the end of the world, live, and that will be our last event. We'll play the national anthem only one time, on the first of June, and when the end of the world comes, we'll play 'Nearer My God to Thee' before we sign off." (Napoli, 2020).

Sebagai bagian dari pengisahan sejarah CNN sebagai media global, penulis juga menyertakan gambar suasana di ruang kontrol CNN ketika mereka melakukan siaran pertama kali pada Gambar 2.6:

Gambar 2.6
Ruang kontrol CNN saat mereka melakukan siaran langsung pertama di tahun 1980



Sumber: Up All Night: Ted Turner, CNN, and The Birth of 24-Hour News, Lisa Napoli, 2020.

Keberanian CNN dalam memberitakan peristiwa-peristiwa yang dianggap kontroversial kemudian menjadikan nama media ini menjadi buah bibir di kalangan publik, misalnya pada 30 Maret 1981, di umur satu tahun kanal media ini berdiri, CNN melakukan liputan langsung terkait percobaan pembunuhan Presiden ke-40 Amerika Serikat, Ronald Reagan di halaman The Hilton Hotel, Wahington, 4 menit lebih awal dibanding kanal media domestik AS lainnya (CNN, 2016). Faktor tersebut menjadi salah satu magnet bagi publik untuk 'melihat' eksistensi dari CNN, dan melalui kesempatan ini jugalah, Ted Turner melihat celah untuk mengembangkan kanal berita miliknya supaya mendapatkan rekognisi lebih jauh.

Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam menghimpun dana, barulah kemudian di tahun 1985, Ted Turner meluncurkan Cable News Network International (CNNI) sebagai langkah awal ekspansi CNN menjadi media global. Melalui ekspansi ini, CNN yang awalnya menyediakan medium sebagai "wajah" publikasi Amerika Serikat kemudian turut mengembangkan orientasinya untuk menggaet audiens internasional. Kemudian selaras dengan itu, CNN turut memperluas kemampuan *newsgathering* sekaligus menjadi jaringan televisi global utama untuk kanal pemberitaan. Konsistensi dan improvisasi yang ditunjukkan oleh CNN telak menjadikan mereka sebagai 'god father' untuk kanal-kanal media lain di seluruh dunia. Hingga kini, kurang lebih terdapat 200 negara dengan bermacammacam media yang melihat CNN sebagai acuan dalam pembawaan beritanya (Tias, 2014).

Dengan membawa konsistensi yang sama dari tahun ke tahun, audiens CNN kemudian berkembang dan jangkauan dari liputan yang dirilisnya pun melejit jauh.

Tujuan awal CNN sebagai medium penyalur informasi dan alat komunikasi politik memang terpenuhi, namun seiring dengan perkembangannya, media ini juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perspektif masyarakat global, bahkan praktik dari politik global itu sendiri dengan menyelubungi pemberitaan mereka dengan agenda tertentu yang menjadi 'tujuan' dari CNN. Walaupun tidak bisa dipungkiri, masih banyak fenomena-fenomena sosial politik yang kemudian mendapatkan sorotan dengan aktifnya pergerakan dari CNN, misalnya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Irak, Libya, dan Suriah sehingga diketahui secara luas oleh publik internasional (Rezza, 2019).

Masih banyak peristiwa lain yang dikemas oleh CNN dengan menyelipkan tujuannya untuk meraih simpati dari publik, misalnya seperti liputan yang dilakukan saat tengah terjadinya Perang Teluk yang pecah di tahun 1990. Setahun setelahnya, CNN mengambil langkah untuk mengadakan liputan langsung dari Baghdad, dimana seorang wartawan CNN secara berkesinambungan melaporkan apa yang dilihatnya dari kamar hotel selama bom sekutu dan rudal jelajah menghantam tanah Irak. Secara keseluruhan, peliputan fenomena ini merupakan sesuatu yang tidak biasa, sehingga publik mulai menunjukkan keresahannya dengan meminta adanya pergerakan dari pemerintah Amerika Serikat. Pihak AS yang melihat adanya ombak emosional dari publik kemudian mengambil tindakan, dimana presiden pada masa itu, George W. Bush, akhirnya memutuskan untuk ikut mengintervensi konflik yang tadinya hanya melibatkan Kuwait dan Irak. Bersamaan dengan pergerakan ini pula, AS menggandeng Arab Saudi dan Inggris

dalam sebuah koalisi operasi militer pada 17 Januari 1991 hingga 28 Februari 1991 (Rezza, 2019).

Selain menimbulkan reaksi publik yang bisa dikatakan signifikan, adanya faktor 'menggiring' dari narasi pemberitaan CNN juga menjadi alasan opini publik terbentuk mengiringi pemberitaan dari fenomena yang sedang diangkat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari fakta bahwa beberapa isu memiliki sentimennya sendiri bagi masyarakat, terutama yang berkenaan dengan identitas politik maupun budaya suatu bangsa (Setiawan, 2019). Oleh karenanya, media massa menjadi salah satu faktor determinan dari perumusan kebijakan luar negeri.

CNN dalam hal ini telak membuka peluang sebagai konsep diplomasi baru bagi Amerika Serikat. Dengan menyadari pengaruhnya yang besar dalam dimensi politik, CNN kemudian menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk merasionalisasi kebijakan luar negeri AS terhadap Irak pada tahun 2003. Dalam pemberitaannya, CNN cenderung menciptakan narasi bahwa operasi militer AS ke Irak merupakan upaya untuk 'membebaskan orang-orang di Irak dan melindungi dunia ini dari bahaya' seperti yang dikutip dari presiden Bush melalui kampanyenya (CNN, 2003). Hal ini kemudian diikuti dengan berita-berita yang menggambarkan kekacauan, pengeboman, dan baku tembak yang membuat audiens berpikir akan runyamnya situasi yang sedang berlangsung. Tak hanya itu, CNN juga menciptakan efek dramatis dengan merilis pemberitaan mengenai pasukan Irak yang menawan dan membunuh tawanan perang AS, dan peristiwa penembakan warga sipil di Irak yang diduga melambaikan tangannya pada tentara sekutu (CNN, 2003). Dengan kekuatan dari liputan CNN selama rangkaian peristiwa ini terjadi, Amerika Serikat

lantas mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil atas kebijakan luar negerinya, sekaligus validasi dari sejumlah negara Timur Tengah bagi AS untuk melancarkan operasi penggulingan pemerintahan Saddam Hussein (Ayu, 2022).

Pemberitan yang dirilis oleh CNN sepanjang berlangsungnya konflik menunjukkan keberpihakannya pada AS, dimana hal ini ditunjukkan dengan kutipan narasumber dan responden dari sisi Amerika Serikat dan sekutunya saja. Lebih lanjut, narasi-narasi CNN surat dengan maksud propaganda politisnya, lantaran terdapat penekanan "kemenangan bagi pihak Amerika Serikat" yang disampaikan secara repetitif. Ringkasnya, fenomena ini merupakan bukti bahwa konstruksi realitas oleh media dapat menyetir publik secara luas, terutama dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh pihak-pihak bersangkutan.

#### 2.3.2. Fenomena CNN Curve/CNN Effect

Adanya bukti-bukti kekuatan CNN dalam mempengaruhi dimensi politik lantas menciptakan ruang diskursus baru, dimana para akademisi akhirnya melakukan penelitian demi penelitian untuk mempelajari efek yang dibawa oleh CNN ke dalam beberapa bagian khusus. Salah satunya yang paling dikenal adalah penelitian dari Steven Livingston.

Menurut Steven Livingston, efek dari CNN, atau yang bisa disebut juga sebagai "kurva CNN" dapat dibagi ke dalam tiga tipologi. Efek CNN yang pertama adalah media berperan sebagai 'accelerant', dimana media dianggap dapat mempersingkat waktu pengambilan kebijakan aparat negara. Hal ini dapat dilihat

dalam kondisi perang, ketika liputan media terus mengalir selama dua puluh empat jam, pemerintah akan terdesak untuk mencetuskan kebijakan sehingga mereka mendapat persepsi baik dari publik. Sebagai hasilnya, respon cepat dari pemangku kebijakan tadi mengabaikan faktor-faktor rasional dan pragmatis tanpa melewati proses analisis dari badan intelijen atau melalui proses pertimbangan rasional. Lalu efek kedua, CNN sebagai 'impediment', dimana ia berkontribusi dalam menghambat sebuah kebijakan nasional. Biasanya, liputan yang dirilis akan cenderung meruntuhkan dukungan publik terhadap kebijakan yang sedang berjalan. Narasi yang dibawa oleh media akan menekankan pada sisi korban/pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Adapun efek terakhir yang dikemukakan oleh Livingston adalah CNN sebagai 'agenda-setting agency' dimana ia dapat menarik para pemimpin negara untuk terlibat dalam konflik atau krisis yang terjadi di negara yang berlokasi cukup jauh, sekalipun pihak tersebut bukanlah ancaman langsung. Peran media sebagai agen penetapan agenda memanfaatkan unsur sentimentalitas dan emosi sebagai motivator audiens untuk mendukung kebijakan luar negeri yang baru (Livingston, 1997).

Selain Steven Livingston, terdapat akademisi lain yang juga meneliti efek dari pemberitaan CNN. Dalam salah satu penelitiannya yang bertajuk "The Society of the Spectacle", Guy Ernest Debord meninjau fenomena "Efek CNN" secara teoritis, dimana ia menyatakan persetujuannya dengan pemikiran McLuhan dan Kracauer yang terlebih dulu mengungkapkan bahwa media massa memiliki peranan penting dalam mengonstruksikan realita, sekaligus narasi dan citra sebuah pihak dalam benak pemirsanya. Tak hanya berhenti pada pernyataan sepakat tersebut,

Debord mengkaji lebih lanjut dengan membedakan dua bentuk masyarakat spektakuler, atau 'tontonan masyarakat' yang tersebar di Eropa Barat dan tontonan 'terkonsentrasi' dari blok Timur yang berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet di tahun 1989. Menurut akademisi Prancis ini, era baru menandakan munculnya bentuk tontonan baru, yang merupakan 'kombinasi rasional' dari aspek-aspek media dan televisi yang telah muncul di era sebelumnya. Hal ini menciptakan tontonan baru yang lebih "terintegrasi" dengan aspek-aspek seperti ekonomi, negara, dan media itu sendiri. Bahkan dalam beberapa poin, masalah seperti terorisme dapat menjadi "bahan tontonan" yang diciptakan oleh negara.

Dalam kaitannya dengan CNN, Debord mengatakan bahwa kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh CNN sebetulnya tidak terlepas dari pengaruh yang dibawa oleh pemerintah atau pelaku ekonomi dalam suatu negara. Hal ini membuat media dengan mudah melabeli kelompok-kelompok tertentu yang mengoposisi negara sebagai "musuh" dalam narasi yang diberitakan. Melalui pembentukan narasi ini pula, maka masyarakat dapat memahami bahwa segala tindakan negara, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuatnya adalah justifikasi untuk melawan "para penjahat" yang tujuannya bertentangan dengan negara. Ditambah dengan mudahnya persebaran berita, maka masyarakat akan lebih mudah untuk disetir cara pandangnya terhadap fenomena sosial yang ada dengan opini-opini yang mengelilingi pemberitaan suatu isu tertentu. Debord juga menambahkan, kemampuan CNN untuk menyajikan berita lebih gesit dibanding kanal media lain pada zamannya dengan teknologi siaran 24 jam, serta keberaniannya dalam meliput berita tentang konflik di Irak menjadi faktor mengapa kanal media ini dipercaya

oleh masyarakat umum sebagai sumber kredibel dari setiap peristiwa yang terjadi di dunia. Lebih lanjut, Debord juga menyampaikan bahwa sejarah panjang CNN sebagai kanal media berita turut menjadi faktor mengapa segala informasi yang disajikan kepada audiens dalam perspektif CNN dianggap sebagai sebuah kebenaran (Debord, 1991).

#### 2.3.3. Pemberitaan CNN dalam Peristiwa Paris Attack 2015

Topik mengenai terorisme sendiri bukanlah sesuatu yang setiap hari muncul dalam diskursus di tengah masyarakat. Sehingga, dengan diangkatnya isu mengenai terorisme dalam media, maka masyarakat akan memusatkan perhatiannya pada liputan/pemberitaan yang dirilis. Hal ini sendiri dijelaskan oleh Mackuen, ketika seorang individu tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni akan suatu topik, maka ia akan semakin gencar menggali informasi dari situs-situs di internet dan kanal pemberitaan (Eriyanto, 2018). Sehingga, pemberitaan media, termasuk cara penyampaiannya kepada audiens akan sangat berpengaruh terhadap persepsi audiens terhadap isu yang diangkat. Begitu pula frekuensi pemberitaan oleh kanal media yang dapat menjadi indikasi akan seberapa signifikan peristiwa yang sedang terjadi.

Di tahun 2015 sendiri, sebetulnya terdapat dua peristiwa serangan bom yang terjadi dalam kurun waktu yang sama, berlokasi di Beirut dan Prancis, dimana peristiwa kedua lebih dikenal sebagai Paris Attack 2015. Dalam kasus serangan bom di Prancis, media, bahkan korporasi-korporasi besar seperti Facebook, mengucapkan kalimat belasungkawa dan menunjukkan simpatinya dengan

menyediakan fitur "Safety Check" yang memperkenankan penggunanya memberikan notifikasi status keamanan kepada pengguna-pengguna lain yang terhubung dengan mereka selama tragedi ini berlangsung. Lebih lanjut, Facebook juga memberikan layar setiap pengguna dengan bendera Prancis (Ferarto, 2017). Simpati juga ditunjukkan oleh Twitter dengan men-trendingkan tagar "PrayForParis" pada aplikasinya. Tak lepas dari itu, tentu saja kanal media global seperti CNN turut memberitakan terjadinya tragedi Paris Attack 2015 secara masif. Melalui laman Twitternya, CNN memposting sejumlah 32 tweets yang berisikan update mengenai Paris Attack, dengan sekiranya 2 tweets diposting setiap satu jam sekali setelah peristiwa pertama kali berlangsung. CNN juga menyertakan tautan artikel pada beberapa tweet yang diunggah pada laman sosial media terkait.

Pada artikel-artikel yang diunggahnya, CNN menyertakan detail peristiwa dengan padat dan komprehensif, misalnya pada artikel "Paris massacre: At least 12 killed in gunfire and blasts, French officials say", kanal pemberitaan ini menyertakan rangkaian kronologi peristiwa Paris Attack, mulai dari tempat kejadian serangan terjadi pertama kali hingga tempat terakhir, dilengkapi dengan tautan google earth map untuk memperkaya detail yang disajikan CNN dalam berita Paris Attack. Selanjutnya, CNN juga menyertakan kutipan-kutipan dari narasumber politisi dunia, misalnya ucapan belasungkawa presiden Barack Obama, hingga kutipan dari laman sosial media presiden Prancis, Francois Hollande, yang mengungkapkan bahwa serangan bom di Paris malam itu adalah sesuatu yang belum pernah negaranya alami sebelumnya (CNN, 2015). Selanjutnya, pada artikel "Inside the Bataclan: 'A bloodbath,' witness says'' CNN merangkum peristiwa

serangan dengan menyertakan video dari seorang warga sipil, Denis Plaud, yang merupakan saksi langsung di tempat kejadian. Serangkaian testimoni dari saksi dipaparkan secara komprehenseif dan mendetail oleh CNN dalam artikel yang dirilisnya, lalu masih sama dengan artikel sebelumnya, CNN turut menyertakan tautan *google earth map* yang menunjukkan titik-titik serangan di Paris (CNN, 2015).

Karena besarnya liputan media atas peristiwa ini, maka berbagai respon pun merebak di kalangan masyarakat internasional. Hal ini tidak menutupi ucapanucapan berduka serta pandangan politisi dari berbagai negara akan tragedi Paris Attack 2015. Dalam salah satu artikelnya yang bertajuk "U.S. officials say no known threat to the homeland in the wake of the Paris attacks", CNN merangkum beberapa tanggapan dari aparat negara Amerika Serikat, salah satu representatif dari organisasi anti-terorisme AS mengungkapkan bahwa taktik yang ditemui dalam peristiwa Paris Attack menyerupai taktik yang telah digunakan oleh sejumlah kelompok teroris lain, termasuk Al-Qaeda, apabila ditinjau dari cirinya yang mengorbankan banyak warga sipil, dan keterbukaan untuk menarik perhatian. Mereka akan meninjau lebih lanjut pula dengan pihak kepolisian lokal Prancis atas kemungkinan-kemungkinan lain, yang menyangkut pelaku maupun resiko serangan lanjutan di Prancis dan kemungkinan serangan serupa di AS. Lebih lengkapnya, CNN juga mewawancarai juru bicara FBI terkait tanggapannya terhadap Paris Attack 2015, dimana hal ini direspon dengan komitmen FBI untuk menelusuri kasus ini demi melindungi rakyat sipil AS dari kemungkinan perluasan serangan dari oknum pelaku (CNN, 2015).

Studi dari Arunika Kumar dan Ruchi Jaggi yang berjudul "News Discourse of Terror Attacks on Twitter: Comparative Analysis of CNN and Al Jazeera's Coverage of 2015 Islamic State Attacks in Beirut and Paris" membandingkan kedua kasus ini untuk mengulas diskursus sorotan media secara umum. Dapat didapati dari studi tersebut, bahwa meskipun kedua kasus serangan terorisme terjadi dalam kurun waktu yang sama, satu kasus mendapatkan liputan dan covarage media yang lebih 'layak' dibandingkan yang lain. Seperti pada kasus Paris Attack, CNN merilis puluhan berita yang mengandung pembahasan ekstensif, beserta pendapat-pendapat ahli maupun aparat negara yang memperkuat betapa krusial serangan terorisme di Paris. Kemudian dalam beberapa pemberitaannya, CNN bahkan memberikan tautan google earth sebagai peta lokasi titik-titik yang diserang. Tak hanya itu, setelah serangan di Paris mengambil tempat, CNN juga memberikan update secara berkala di laman Twitternya.

Hal ini absen dari peristiwa serangan di Beirut, dimana CNN hanya merilis beberapa artikel dan tidak memberikan update berkala seperti yang dilakukan pada Paris Attack. Ketimpangan liputan yang diberikan oleh CNN menandakan adanya bias akan kepentingan media tersebut pada negara-negara yang bersangkutan. Menurut Maxwell E. McCombs dan Donald L. Shaw, media dapat disinyalir memiliki fungsi agenda setting dengan pilihan berita yang ia liput. Kedua akademisi tersebut menyebutkan, "Dalam memilih untuk menampilkan suatu berita tertentu, editor, staff kanal pemberitaan, sekaligus penyiar memainkan peran dalam mengonstruksi suatu realita politik. Audiens akan menangkap penekanan kepentingan isu pada seberapa sering/seberapa banyak kasus yang bersangkutan

diangkat ke permukaan." (Maxwell E. McCombs, 1972). Konstruksi realita yang dilakukan oleh CNN ini berdampak pada bagaimana audiens global melihat isu Paris Attack. Dibandingkan dengan Beirut, berita mengenai Paris Attack lebih mudah untuk diakses, dan lebih sering didengar lantaran pengulangan-pengulangan berita yang dirilis. Oleh karenanya, publik menganggap bahwa kasus Serangan Paris lebih penting dan lebih krusial. Selain itu, terdapat bias persona dari kedua kota lokasi sendiri, dimana Paris lebih dikenal sebagai kota wisata dan kultur, sementara Lebanon lebih erat dengan perseteruan dan konflik wilayah. Faktor ini secara tidak langsung menjadi determinan bagi audiens dalam memilah beritanya, lantaran Paris dianggap lebih damai, maka kejadian serangan teroris ini menjadi sesuatu yang tidak biasa, lain hal dengan Lebanon yang dianggap sering mengalami kejadian serupa, sehingga serangan terorisme yang ada di tahun 2015 menjadi sedikit kabur urgensinya (Kumar & Jaggi, 2020).